

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENDAMPING KONTRAK
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;
3. Pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
4. Pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya sumber daya manusia yang dapat membantu, dalam perencanaan kontrak sampai dengan penyelesaian masalah kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pendamping Kontrak pada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

- KEDUA : Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pendampingan merancang kontrak, persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak dan memberi solusi-solusi terkait permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan, peraturan yang berlaku, mencegah kerugian negara dan menghindari perbuatan tindak pidana korupsi;
- KETIGA : Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pendamping Kontrak mendapat penugasan dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan kompetensi yang dimiliki atau dibentuk dalam suatu tim. Tim Pendamping Kontrak diharuskan melakukan koordinasi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.
- KELIMA : Pembiayaan terkait pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kontrak dibebankan kepada DIPA LKPP atau anggaran Instansi pemohon Tim Pendamping Kontrak.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2019
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM
PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2019

NOMOR : 4 Tahun 2019
TANGGAL : 31 Juli 2019

TIM PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
1	Abdul Kadir	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	Pasuruan Jawa Timur
2	Acep Much. Parlan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Batam Kepulauan Riau
3	Achmad Zikrullah	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Jakarta Pusat DKI Jakarta
4	Ade Kristianto	Universitas Palangka Raya	Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
5	Agus Kurniawan	Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Jayapura Papua
6	Agus Yusuf Arianto	DKP Pemerintah Kabupaten Kediri	Kediri Jawa Timur
7	Ahmad Ari Pandi Harahap	Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan Sumatera Utara
8	Aisah Ahmad	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Ternate	Kota Ternate Maluku Utara
9	Anang Dwi Resdianto	BPBD Kabupaten Jember	Jember Jawa Timur
10	Andi Juana Fachruddin	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Luwu Timur Sulawesi Selatan
11	Anwar Subianto	PT. Procurindo Selaras Mandiri	Cilacap Jawa Tengah
12	Arthur Halik Razak	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Makassar Sulawesi Selatan
13	Baharuddin Dwi Isnanto	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian LHK	Palangka Raya Kalimantan Tengah
14	Baihaki	DPD IAPI DKI Jakarta	Jakarta Pusat DKI Jakarta

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
15	Budi Sukiswo	Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	Sleman DI Yogyakarta
16	D. N. K. Widnyana Maya	Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Bangli Bali
17	Deby Sandra	RSUP. Dr. M. DJamil Padang	Kota Padang Sumatera Barat
18	Dewa Gde Padmayasa	Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar	Gianyar Bali
19	Dewi Larasati	Direktorat Logistik Institut Teknologi Bandung	Kota Bandung Jawa Barat
20	Djuliman Bale	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara
21	Eka Wara Marthianti	Sekretariat PPK Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Jakarta Barat DKI Jakarta
22	Endra Mayendra	Komisi Informasi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
23	Faradillah Yusuf Liputo	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso	Poso Sulawesi Tengah
24	Fadhliil Khaliq Irawan	Biro Admnsitasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda Kalimantan Timur
25	Frans Budiman Johannes	Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Galuh Tantri Narindra	Bappeda Litbang Kabupaten Banjar	Banjar Kalimantan Selatan
27	Gusti Noviar Kusuma	Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut	Tanah Laut Kalimantan Selatan
28	Hasnah Arief	Birro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Sulawesi Tenggara
29	I Made Budi Adiana	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat	Kota Denpasar Bali

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
		Daerah Pemerintah Provinsi Bali	
30	I Made Sudarsana	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Badung Bali
31	Ilham Achmad	UKPBJ Universitas Sriwijaya	Ogan Ilir Sumatera Selatan
32	Indra Gunawan	Sekretariat Daerah Kab. Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
33	Irwan	Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Sulawesi Tengah
34	Iwan Kustiawan	Dinas Dukcapil Pemerintah Kota Banjar	Kota Banjar Jawa Barat
35	Jimmi Zikria	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Kota Jantho Aceh Besar Aceh
36	Juni Irawati	Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu Bengkulu
37	Kusyanto	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Pemalang Jawa Tengah
38	M Kahar A Palinrungi	Universitas Negeri Makassar	Kota Makassar Sulawesi Selatan
39	M. Muklis Isnaini	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kediri	Kota Kediri Jawa Timur
40	Mahdi Syamri	Lapas Kelas IIA Balikpapan Kementerian Hukum dan HAM RI	Kota Balikpapan Kalimantan Timur
41	Mandar Trisno Hadisaputra	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan	Kota Manado Sulawesi Utara
42	Mirhan Triandi Doe	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Morowali Utara Sulawesi Tengah
43	Mohammad Kemal Pasha	International Fund of Agricultural Development	Jakarta Pusat DKI Jakarta
44	Muhammad Alfian Amri	Dinas PUPR Kabupaten Maros	Maros Sulawesi Selatan
45	Muhammad Nur Yahya	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh Aceh
46	Mustofa Kamal	Pusdiklatwas BPKP	Bogor Jawa Barat

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
47	Nosin	Lembaga Administrasi Negara	Jakarta Pusat DKI Jakarta
48	Nursiah	RS Kanker "Dharmais"	Jakarta Barat DKI Jakarta
49	Rahfan Mokoginta	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu	Kotamobagu Sulawesi Utara
50	Raymon Budi	Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat DKI Jakarta
51	Reflus	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)	Jakarta Selatan DKI Jakarta
52	Rifda Arafah	UKPBJ IAIN Bengkulu	Kota Bengkulu Bengkulu
53	Rohana Litasmi	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu Bengkulu
54	Rudi Suhendra	Kementerian Agama Kanwil Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kalimantan Barat
55	Sinta Posmaria Silalahi	Ditjen Bina Marga BPJN IV Kementerian PUPR	Kota Jambi Jambi
56	Slamet Suhariadi	Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia	Kota Samarinda Kalimantan Timur
57	Sohna MUSAAD	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Kota Jayapura Papua
58	Subandi	Biro Umum dan Sekretariat Badan Pengusahaan Batam	Kota Batam Kepulauan Riau
59	Sukri	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	Maros Sulawesi Selatan
60	Suratmo	Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia	Jakarta Selatan DKI Jakarta
61	Suroso	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
62	Surya Situmeang	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura	Jayapura Papua

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
63	Suryamiharja	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari	Manokwari Papua Barat
64	Susan Apriliyan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	Pekalongan Jawa Tengah
65	Sutan Rusdi	Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Gorontalo
66	Syafruddin A.Mahurati	BPBD Kota Palu	Kota Palu Sulawesi Tengah
67	Tatang Sontani	Sekretariat Daerah Kabupaten Batang	Batang Jawa Tengah
68	Tri Wahyu Rubianto	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Kota Batam	Kota Batam Kepulauan Riau
69	Wiwik Widyawati Mayang	Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Gorontalo
70	Yanes Gusman Panie	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

IKAK G. PATRIASTOMO